

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adjie, Habib., *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Adjie, Habib., *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, Habib., *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Adjie, Habib., *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, Habib., *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama, Sidoarjo, 2014.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 1971
- HS, Salim., *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Parlindungan, A.P., *Konversi Hak-hak atas tanah, Mandar Maju*, Bandung, 1990.
- Prajitno, A.A. Andi., *Pengetahuan Praktis : Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*”, Selaras, Malang, 2010
- Ramelan, Eman., *Hukum pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Airlangga Iniversity Press, Surabaya, 2014.
- Santoso, Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, PT Revka Petra Media, Surabaya,

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Jaya, Bandung, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah

[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974](#) Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Kepala Badan Pertanaahn Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Internet

Kamus Besar Bahas Indonesia, <http://kbbi.web.id/tanah>, di unduh pada 28/10/2015 jam 10.29